

MEMPERTAHANKAN NKRI MELALUI BUDAYA

Mardjono*)

Globalisasi, khususnya yang menyangkut isu Humanisme, termasuk di dalamnya isu minoritas, tampaknya perlu segera disikapi dengan kewaspadaan ekstra. Laporan akhir tahun 2004 dan prediksi sementara bidang sosial tahun 2005 seperti yang disampaikan Prof. Dr. Sunyoto Usman (Guru Besar Fisipol UGM) dan Drs. Moch. As'ad, S.U. (Fakultas Psikologi UGM) sungguh sangat mengagetkan. Betapa tidak, globalisasi yang pada awal kemunculannya (1980-1990) diyakini sebagai fenomena yang sangat prospektif dan menjanjikan, tiba-tiba menjadi sebuah momok menakutkan, karena globalisasi telah dinilai sebagai perusak pranata sosial yang ada di setiap wilayah dan atau negara (Kedaulatan Rakyat, 21/12).

Kenyataan ini juga bisa kita saksikan, bahwa sejak dilangsungkannya konferensi dunia bidang sosial yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada awal 2004 lalu, sebenarnya makin banyak warga dunia yang anti globalisasi. Ini menjadi indikasi betapa kuatnya retensi masyarakat – khususnya dunia ketiga – terhadap globalisasi, karena dengan segala karakteristiknya, globalisasi telah menghilangkan sekat-sekat ruang dan waktu, yang tidak saja mengubah perilaku sosial positif, tetapi juga negatif. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari masyarakat dunia, ada kecenderungan pemerintah kita mengikuti selera global, tapi pada tataran akar rumput, kultur masyarakat kita sebenarnya dapat dikategorikan sebagai kelompok yang anti globalisasi, meski pada kenyataannya mereka tidak berdaya. Kita dapat melihat bukti bahwa globalisasi telah mengubah pola perilaku sosial masyarakat. Kehadiran teknologi – sebagai akibat globalisasi – yang seharusnya mampu memberdayakan masyarakat, ternyata justru telah menjebak masyarakat pada perilaku yang

*) Marskal Muda TNI Mardjono, SW adalah Gubernur AAU dan pemerhati budaya.

konsumtif. Masyarakat juga ter-giring pada cara pikir yang *present time* (sekarang) tanpa mampu berpikir untuk kepentingan masa depan.

Untuk konteks kehidupan ber-bangsa dan bernegara, semangat global yang terkait dengan isu HAM sangat diyakini dapat memudarkan konsep berdirinya negara bangsa (*state nation*). Untuk konteks Indonesia, kondisi ini juga dipicu dengan merebaknya fenomena minoritas yang ingin menonjolkan eksistensinya. Dua isu ini ikut andil dalam memunculkan fenomena disintegrasi di berbagai pelosok wilayah tanah air.

Seiring perkembangan peta sosial politik, disintegrasi, dari waktu ke waktu makin menunjukkan gejala yang meningkat. Belum siapnya kultur masyarakat kita — karena masih dalam masa transisi berdemokrasi — telah menggiring mereka pada suatu kondisi kegamangan dalam memahami substansi hidup berdemokrasi. Muaranya adalah masyarakat terjebak pada eforia sempit, karena mereka baru se-kadar mampu menuntut hak-haknya tanpa terpikir bagaimana menjalankan kewajibannya sebagai warga bangsa.

Beberapa konflik yang terjadi di daerah, seperti di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Ambon, Papua, Poso serta daerah

lain, merupakan indikasi bahwa bangsa ini sedang menghadapi ancaman besar dengan masalah disintegrasi. Ibarat tubuh manusia, bangsa ini tak ubahnya “pe-sakitan” yang secara pelan-pelan sedang digero-goti “virus”, yang bernama disintegrasi.

Tentunya kita tidak meng-inginkan peristiwa lepasnya propinsi Timor Timur terulang. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh komponen bangsa ini untuk menjaga keu-tuhan bangsa dan negara Indonesia, sesuai profesi dan peran-nya, sehingga cita-cita nasional seperti yang diamanatkan dalam konstitusi kita, yaitu terselengga-ranya Negara Kesatuan Repu-blik Indonesia dari Sabang sam-pai Merauke benar-benar dapat terwujud.

Gaya hidup modern

Dalam masyarakat kita se-karang, memang sedang terjadi proses interaksi budaya — antara lokal dan pendatang — yang demikian hebat. Hasil proses in-teraksi ini, sangat mempenga-ruhi cara pandang masyarakat kita, baik terhadap akar budaya sendiri maupun kebiasaan-kebi-asaan baru (kalau belum pantas disebut budaya), yang merupa-kan produk dari interaksi tadi.

Alhasil, kita sekarang sedang dihadapkan pada situasi yang sangat krusial, terutama yang

berkaitan dengan soal gaya hidup (*life style*) dan cara pandang (*mind style*) masyarakat. Globalisasi bukan berarti mengadopsi semua yang berasal dari barat serta menanggalkan hal-hal yang berbau lokal. Globalisasi harus dimaknai sebagai sebuah pintu gerbang masyarakat untuk masuk dunia baru, yang sekarang kita kenal dengan istilah gaya hidup modern. Di sini tentunya kita harus arif dalam memaknai arti gaya hidup manusia modern itu sendiri. Bukan berarti yang lokal itu tidak modern, dan sebaliknya semua yang dari luar lebih modern.

Dalam kaitannya dengan modernisasi dan gejala terpinggirkannya budaya lokal, persoalan paling mendasar justru terletak pada masyarakat itu sendiri, bukan budayanya (lokal atau luar). Untuk aspek gaya hidup modern misalnya, apakah masyarakat kita sudah memaknai secara benar tentang perubahan yang ada. Bila jawabannya ya, seharusnya keprihatinan berbagai pihak terhadap fenomena terpinggirkannya budaya lokal tentunya tidak perlu terjadi.

Kita mungkin sudah waktunya untuk melakukan kontemplasi tentang hakikat selera masyarakat modern. Bila kita tengok, maka di dalamnya akan kita temukan tiga elemen dasar,

yaitu yang menyangkut aspek *higienis* (sehat), *estetis* (seni) dan *leisure* (nyaman). Ada indikasi, kita belum begitu memperhatikan tiga hal ini, khususnya dalam menjalani hidup di era sekarang. Salah satu contoh yang paling sederhana dan mudah untuk ditemukan, khususnya dalam masyarakat Yogyakarta adalah kebiasaan para penjaja makanan (warung) tradisional yang tampil begitu pasif dan apa adanya dalam menjajakan produknya, bahkan yang lebih parah terkesan kurang inovatif.

Jajanan yang ditampilkan dengan tidak memperhatikan aspek *higienis*, *estetis* dan *leisure* dalam kehidupan modern seperti sekarang tentunya akan di jauhi konsumen. Meskipun bahan mentahnya sama-sama ayam, tentunya masyarakat akan memilih ayam goreng yang disajikan secara cepat, murah, sehat serta dikemas secara menarik, ketimbang sebaliknya. Tampaknya cara pertama tadi lebih banyak dilakukan oleh penjaja makanan dari luar (lisensi luar), sementara kita belum melakukannya. Sehingga terkesan, penjaja lokal (bukan kultur lokal), tersisihkan oleh penjaja luar. Demikian juga dalam komunitas penjual/ pengecer, kebanyakan kita belum memperhatikan aspek efisiensi serta kenyamanan pe-

langgan. Sebagai fasilitas pemenuhan kehidupan sehari-hari, seharusnya pasar atau warung dikelola sesuai dengan selera modern. Bukan sebaliknya, terkesan kumuh dan kurang memberikan daya tarik.

Perlu Pembelajaran

Masalah ini sebenarnya bisa diantisipasi, bila kita senantiasa mengajarkan kepada masyarakat tentang cara-cara menyikapi gaya hidup masyarakat modern. Kita masih beranggapan bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah benar, padahal belum menyentuh nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan jaman, khususnya yang menyangkut selera modern. Sementara komunitas penjual dari luar, mampu menawarkan tempat dan produk yang bersih, *higienis*, bahkan tempat yang bernilai rekreatif yang kini sudah merambah ke pelosok-pelosok (fenomena menjamurnya *Indomart*).

Permasalahan penting yang belum digarap dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam mengantisipasi perkembangan selera modern, adalah mengajarkan tentang konsep hidup modern. Konsep ini sepertinya masih tersimpan dalam catatan serta pemikiran para ilmuwan dan kaum terdidik. Hal ini belum diajarkan kepada masyarakat sebagai salah

satu orientasi untuk meningkatkan kinerja ataupun kualitas produksinya yang diperlukan di masyarakat yang terus berkembang secara dinamis.

Konsep *higiene* dengan konotasi bersih, sehat dan kandungan manfaatnya tinggi, jelas merupakan tuntutan lebih lanjut yang ingin dicapai oleh orang-orang atau masyarakat maju atau berpendidikan. Karena hal ini akan menyangkut hal-hal yang bersifat prinsip dalam kehidupannya yaitu keamanan diri yang dinilai dari sifat fisik seperti halnya kesehatan dan terbebas dari ketakutan atas kemungkinan terganggunya kesehatan, sehingga berusaha menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan kekurangan sehatan, termasuk dari makanan, perangkat makan/minum dan lain-lain.

Konsep *estetika*, adalah bentuk lain dari tuntutan kebutuhan batin atau jiwa manusia atas hal-hal yang dapat membuat senang atau bahagia dari apa yang dilihat. Sejalan dengan semakin meningkatnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya (dari hal yang mendasar), maka akan meningkat pula kebutuhan batin yang mengarah pada pemanjaan rasa kenikmatan atas keindahan dari apa yang dilihat. Bagi masyarakat kelompok menengah ke atas, melihat potongan-potongan makanan yang be-

sar-besar mungkin akan “merasa kenyang”. Juga makanan yang berwarna gelap karena gosong atau warna lain yang cenderung tidak membangkitkan selera, semua ini praktis akan ditinggalkan konsumen.

Demikian juga pembungkus atau tempat untuk penyajiannya perlu mengarah pada bentuk-bentuk yang estetis, tepat dalam ukuran besar dan kecilnya serta indah dalam desain bentuk dan warnanya. Tuntutan terhadap pemanjaan rasa keindahan ini juga cenderung semakin meningkat sejalan dengan tingkat edukasi dan juga status sosial seseorang atau masyarakat.

Konsep ketiga yaitu *leisure*, adalah tuntutan lain dari manusia atas rasa nyaman atau kenyamanan baik untuk batin maupun jiwa. Bagi masyarakat modern yang cenderung selalu sibuk, perlu penyeimbang agar tetap bisa produktif. Rasa nyaman, tenteram adalah jawaban untuk itu. Hal ini akan didapat bila seseorang berada pada suasana atau nuansa yang memberikan sentuhan-sentuhan rasa nyaman, tenteram. Tentu saja sentuhan rasa yang diharapkan adalah yang sifatnya positif. Suasana santai, tenteram, sejuk nyaman baik yang disajikan oleh alam, penataan ruang, penataan suhu, penerangan dan juga pelayanan yang baik, adalah bentuk

dari konsep *leisure*.

Memahami tentang kecenderungan selera modern tersebut, yaitu *higienis, estetis* dan *leisure* apakah berarti yang harus disajikan dan dikonsumsi adalah bentuk yang memberikan konotasi modern seperti produk pabrik, restoran-restoran besar, lingkungan hotel dan sebagainya. Apakah hal-hal yang berstatus lokal seperti kue tradisional, warung, losmen dan sebagainya harus tergusur seperti yang selama ini kita saksikan?

Berbicara masalah lokal (budaya lokal) konotasinya adalah, tradisional, kuno dan kesan lain yang cenderung negatif. Jarang diingat bahwa kata lokal atau budaya lokal adalah untuk kepentingan *survive* atau kebutuhan untuk hidup yang cocok, sudah pas untuk kebutuhan sekunder, serta sudah sesuai dan teruji atas hal-hal yang terkait dengan geografi, klimatologi dan kebiasaan-kebiasaan lainnya, termasuk selera. Tetapi mengapa sampai terjadi budaya dan nilai lokal tergusur oleh modernisasi, selera lokal hilang oleh selera modern.

Dalam konteks budaya atau kebudayaan di mana setiap bangsa selalu ingin mencapai pada tataran modern, maka diperlukan konsep yang jelas, apa dan bagaimana modernisasi itu. Dari beberapa contoh yang

dapat dilihat, bahwa bangsa yang maju peradabannya, adalah mereka yang mampu mempertahankan warna, identitas, karakter yang dimiliki sejak dahulu. Karena mereka mampu mengambil *patron* yang intinya bahwa modernisasi budaya adalah penyempurnaan atas nilai-nilai atau budaya tradisional sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Dalam konsep ini, budaya dibangun dan dikembangkan dengan pondasi nilai-nilai atau budaya tradisionalnya. Jadi dengan pondasi yang memiliki warna identitas atau karakter yang sudah ada tersebut, maka bangunan apa pun yang berdiri di atasnya tentunya juga memiliki warna identitas maupun karakter yang sama, namun sudah dalam status yang modern.

Apapun mekanisme modernisasi itu, apakah melalui transformasi, keterpengaruhan, peralihan, pertukaran dan sebagainya, sejauh pondasinya telah dibangun kuat, maka tidak perlu dirisaukan lagi tentang akan hilangnya, tercabutnya, termarginalisasinya budaya sendiri. Dengan konsep ini, maka seperti apa modernnya Indonesia, harus tetap memiliki karakter Indonesia.

Sebagai contoh, *gethuk* sebagai makanan tradisional kalau disajikan dalam kondisi yang masih kita lihat seperti sekarang

ini mungkin akan sulit untuk masuk ke hotel-hotel berbintang atau pada jamuan-jamuan resmi. Namun kalau dari sisi *higiene* sudah diolah secara apik, kemudian dibuat dalam bentuk dan warna yang indah serta disajikan dalam nuansa yang menyenangkan, diperkirakan *gethuk* akan dapat diterima di mana pun. Demikian juga tentang warung, serendah-rendahnya tingkat sosial seseorang pasti dia lebih senang kalau belanja di tempat yang bersih, rekreatif, apalagi komoditi yang diperjualbelikan juga *higiene*, kemasannya bagus, kualitasnya bagus, dilayani dengan baik dan cepat, maka warung-warung makan dapat diselamatkan dan bisa bersaing dengan minimarket. Karena warung memiliki kelebihan sudah tersentuh dan melekat dengan selera setempat, demikian juga tentang losmen atau penginapan milik rakyat. Sehingga produsen *gethuk*, *thiwul* dan makanan tradisional lainnya tidak perlu sungkan-sungkan menjajakan barang dagangannya, termasuk untuk memasuki konsumen menengah (hotel berbintang) bila ia mampu mempraktekkan konsep gaya hidup modern.

Dari permasalahan di atas, berarti bahwa dalam masalah selera tidak perlu ada kekhawatiran akan tergusurnya kultur lokal

oleh modernisasi. Karena semua akan bergantung bagaimana masyarakat kita menyikapinya. Itu semua terkait dengan bagaimana komitmen kita untuk mengatasinya. Kecenderungan selera modern tersebut sejauh ini belum terdengar disosialisasikan di masyarakat. Ini mestinya diperankan oleh kelompok intelektual, cendekia, dan termasuk media massa.

Dari aspek ekonomi, secara tradisional di masyarakat kita sebenarnya sudah memiliki sistem pasar yang berbasis kultural asli Indonesia, yang mana satu daerah dengan daerah lainnya memiliki kemiripan. Filosofi kultural tersebut dapat disimak, dari beberapa fenomena sebagai berikut, Pertama, terkonsentrasinya kegiatan pasar yang dapat meningkatkan atau melipatgandakan perputaran nilai ekonomi, karena semakin meningkatnya komoditi yang diperjualbelikan, juga akan meningkatkan frekuensi kehadiran penjual dan pembeli, yang berarti akan meningkatkan aktivitas transaksi. Kedua, konsentrasi kegiatan yang cenderung memberikan keuntungan secara ekonomi tadi, pelaksanaannya digilir sebanyak jumlah pasar yang ada di dalam komunitas daerah tertentu, sehingga mencerminkan pemerataan keuntungan yang bernuansa keadilan. Ketiga, mekanis-

me pemusatan kegiatan tersebut, juga memberikan dampak bagi naiknya industri jasa yang juga menambah penyebaran distribusi penghasilan. Keempat, dari mekanisme tersebut, akhirnya melahirkan sifat ketergantungan satu sama lain, dalam arti masing-masing pasar saling membutuhkan, sehingga akan mendorong jalinan kerjasama yang mengarah pada persatuan.

Di Jakarta fenomena ini, dapat kita lacak dari nama-nama pasar yang menggunakan nama hari dalam satu minggu, (pasar Minggu, pasar Senen, dan seterusnya) yang menunjukkan waktu gilirannya. Sementara di Yogyakarta dan Solo cenderung ditampilkan hari pasaran atau gabungan antara hari dengan pasaran.

Gambaran tersebut, sebenarnya telah menampilkan mekanisme yang cocok dan telah teruji di negeri ini. Permasalahan untuk dijadikan modal dalam wujud sistem perekonomian nasional, sebenarnya tinggal membesarkan dimensinya dengan tetap memegang filosofi yang tergambar secara sekilas, adalah bagaimana agar tercipta kondisi saling membutuhkan antardaerah-daerah atau antarpulau.

Dengan adanya kerjasama ini, maka akan berakibat pada perlunya antara pelaku pasar tadi melakukan kerjasama secara berlanjut, sehingga akhirnya akan

melahirkan kerukunan dalam satu ikatan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian tergambar jelas di sini bahwa penggarapan ekonomi rakyat dengan pendekatan budaya (baca: pasar tradisional) cenderung dapat memberikan kontribusi positif dalam konteks mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam bidang politik dan pertahanan, dari sistem dan mekanisme yang telah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dulu, kita juga dapat mencontoh beberapa kebijakan yang telah diambil para leluhur kita. Untuk mempertahankan struktur dan postur kerajaan, telah diterapkan berbagai cara. Guna mempertahankan jalur komando dan pemerintahan misalnya, telah diterapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama dalam bentuk emosional spiritual. Dalam pada ini umumnya berbentuk perkawinan keluarga raja dengan raja-raja di daerah, sehingga praktis tergalang kekuatan yang berdasarkan hubungan darah. Kedua, dalam bentuk kepercayaan dengan pendelegasian wewasan dan tanggung jawab, baik berbentuk jabatan atau simbolik dengan pemberian pusaka. Ketiga, melalui konsep pembinaan terpusat seperti yang dilakukan Gajah Mada dengan pendidikan *Dharma Putera* yang

diikuti oleh putera raja-raja di Nusantara. Keempat, melalui seloka-seloka atau semboyan yang menerapkan komitmen bersama untuk tetap satu yang diterapkan oleh Raja Hayam Wuruk yaitu "*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hanna Dharma Mangrowa*". Dari cara atau mekanisme tersebut pada dasarnya secara filosofi dapat didapat pemahaman, Pertama, adanya upaya ikatan emosional; kedua, ada pendelegasian atau pemberian kepercayaan; ketiga, adanya pembinaan strategis dan keempat adanya komitmen bersama untuk bersatu.

Dari konsep atau metode yang telah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan yang cenderung merupakan warisan budaya tersebut, pada dasarnya secara filosofi masih dapat digunakan di zaman modern ini. Mungkin bentuknya lain namun filosofinya dapat tetap sama. *Ajusment* yang diperlukan adalah terkait dengan struktur kekuasaan yang sudah lain di satu pihak serta orientasi pencapaian sasaran serta aspek ancaman yang sudah berbeda bentuknya. Dari pengertian-pengertian tersebut telah memberikan pemahaman bahwa penggarapan politik dan pertahanan yang berpijak dan menggunakan pendekatan budaya, dalam hal ini mekanisme dan tata nilai atau filosofi lama, masih tetap relevan untuk mem-

pertahankan keutuhan NKRI. Faktor penting lain untuk mempertahankan NKRI adalah dengan pendekatan budaya dari aspek sejarah. Hal ini selain dari aspek geografi dari kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu, namun yang jarang dibicarakan justru dari aspek sosiologi/antropologi, terutama atas fakta eksisnya bangsa Melanesia di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dari berbagai aspek kehidupan berbangsa Kawasan Timur Indonesia (KTI) dianggap relatif tertinggal dibanding di Kawasan Barat Indonesia (KBI) terutama budaya termasuk pendidikannya. Rendahnya perhatian penggarapan budaya terhadap bangsa Melanesia yang ada di KTI, dibarengi dengan efektifnya organisasi "*Melanesia vs Bratherhood*" yang berpusat di salah satu negara Pasifik Selatan. Nuansanya adalah masyarakat Papua cenderung terbawa aspirasi organisasi tersebut dan mengarah pada disintegrasi.

Ini sebenarnya masalah serius di satu pihak karena dapat mengancam keutuhan NKRI dan ironis di lain pihak, karena bangsa Melanesia di Pasifik dua pertiganya adalah penghuni KTI atau warga negara Indonesia. Dari pemahaman ini intinya adalah kalau ingin mempertahankan NKRI maka penggarapan bangsa Melanesia melalui pendekatan budaya adalah mutlak. Diperlukan pemahaman dan komitmen yang kuat untuk ini. Organisasi dan sarana seperti Pusat Budaya Melanesia di KTI apakah di Biak, Ambon, Makassar atau Kupang.

Bila kita semua punya komitmen kuat terhadap masalah ini, sebenarnya secara tidak langsung, kita sudah ikut andil dalam upaya-upaya menyelamatkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari bahaya eksodus budaya asing yang dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan.